



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Jl. Dr. Soetomo No. 03 Telp. (0328) 662133
SUMENEP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

DAFTAR ISI LKjIP

		Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Gambaran Umum	1
	1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	3
	1.3. Aspek Strategis Organisasi	5
	1.4. Permasalahan Utama Yang Dihadapi.....	7
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	9
	2.1. Rencana Stratejik	9
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	14
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
	3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan	17
	3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ...	21
	3.4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	24
	3.5. Realisasi Anggaran	27
BAB IV	: PENUTUP	30
	4.1 Kesimpulan	30

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas Rahmad dan Hidayah Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dapat terselesaikan.

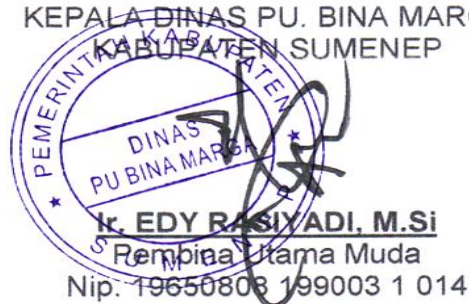
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di susun berdasarkan surat Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep tanggal 04 Januari 2018 Nomor : 067/10/435.032.3/2018 perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Th. 2018 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih kami sadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan jalan dan jembatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS PU. BINA MARGA
KABUPATEN SUMENEP



Ir. EDY BASIYADI, M.Si

Kepala Dinas

Nip. 19650803 199003 1 014

EKSEKUTIF SUMMARY (Ringkasan Eksekutif)

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 Bidang dalam kegiatan tahun 2017 mempunyai 1 (Satu) sasaran dengan 2 (Dua) Indikator, Dimana capaian kinerja rata-rata 105,45% untuk indikator pertama yaitu *Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik, Wilayah Daratan* tercapai 109,26% dan *Kepulauan* 101,64%. Untuk indikator kedua yaitu *Proporsi Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik* mempunyai capaian kinerja rata-rata 111,31% untuk *Wilayah Daratan* tercapai 111,50% dan *Wilayah Kepulauan* 111,11% .

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep mengalokasikan dalam APBD tahun 2017 berupa Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) masing-masing sebesar Rp. 6.578.863.972,00 dan Rp. 87.093.262.898,00 Adapun realisasinya sampai dengan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.685.079.855,00 atau sebesar 86,41 % dan Rp. 76.709.416.864.00 atau 88,07 %.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Perencanaan kegiatan yang belum seluruhnya sistematis dan terkoordinir;
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang belum sepenuhnya memadai;
3. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang belum lengkap;
4. Kualitas aparatur pemerintah yang belum seluruhnya berkualitas;
5. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan atau kegiatan lainnya yang belum didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
6. Koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana dengan baik.

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir;
2. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
3. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara teliti dan lengkap;
4. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui Diklat, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggung jawab);
5. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

- dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang di dukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
6. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep didalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana strategi Tahun Anggaran 2016. Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BABI PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahansosial – ekonomi masyarakat menuju kearah yang lebih baik dalam kegiatan pembangunan, perubahan tentu tidak hanya diharapkan terjadi pada perubahan taraf hidup dan derajat partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayah, tetapi sentuhan aspek fisik prasarana bidang kebinamargaan yang merupakan faktor penentu dalam memfasilitasi terhadap keberhasilan pembangunan perlu mendapatkan perhatian.

Kondisi umum prasarana transportasi jalan maupun jembatan di Kabupaten Sumenep sampai saat ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama masalah kualitas dan kuantitas prasarana yang tersedia. Disamping itu, pengelolaan sumber daya baik pendanaan SDM dan teknologi yang efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan pelayanan jasa prasarana transportasi di seluruh Kabupaten Sumenep juga memiliki keterbatasan.

Pembangunan bidang prasarana transportasi semakin diperlukan perannya dalam rangka menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan serta dalam rangka menjamin mobilitas, kelancaran arus lalu-lintas barang dan jasa secara luas, tertib, aman, cepat dan efisien ke seluruh pelosok daerah selain itu pembangunan bidang prasarana transportasi juga merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka merangsang pertumbuhan dan perkembangan bidang-bidang lainnya.

Menyadari akan pentingnya pengembangan prasarana jalan dan jembatan yang secara terus menerus dikembangkan dan diakselerasikan dengan perkembangan angkutan jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan arus lalu-lintas dengan daya dukung jalan, jaringan pertumbuhan ekonomi dan jaringan pemasaran produksi demi peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, maka Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep yang

memiliki tingkat urgensi cukup tinggi terhadap penyediaan prasarana jalandan jembatan, harus eksis dengan dukungan aparatur yang senantiasa berpegang teguh pada disiplin kerja, sehingga diperoleh kinerja instansi Dinas PU. Bina Marga secara optimal.

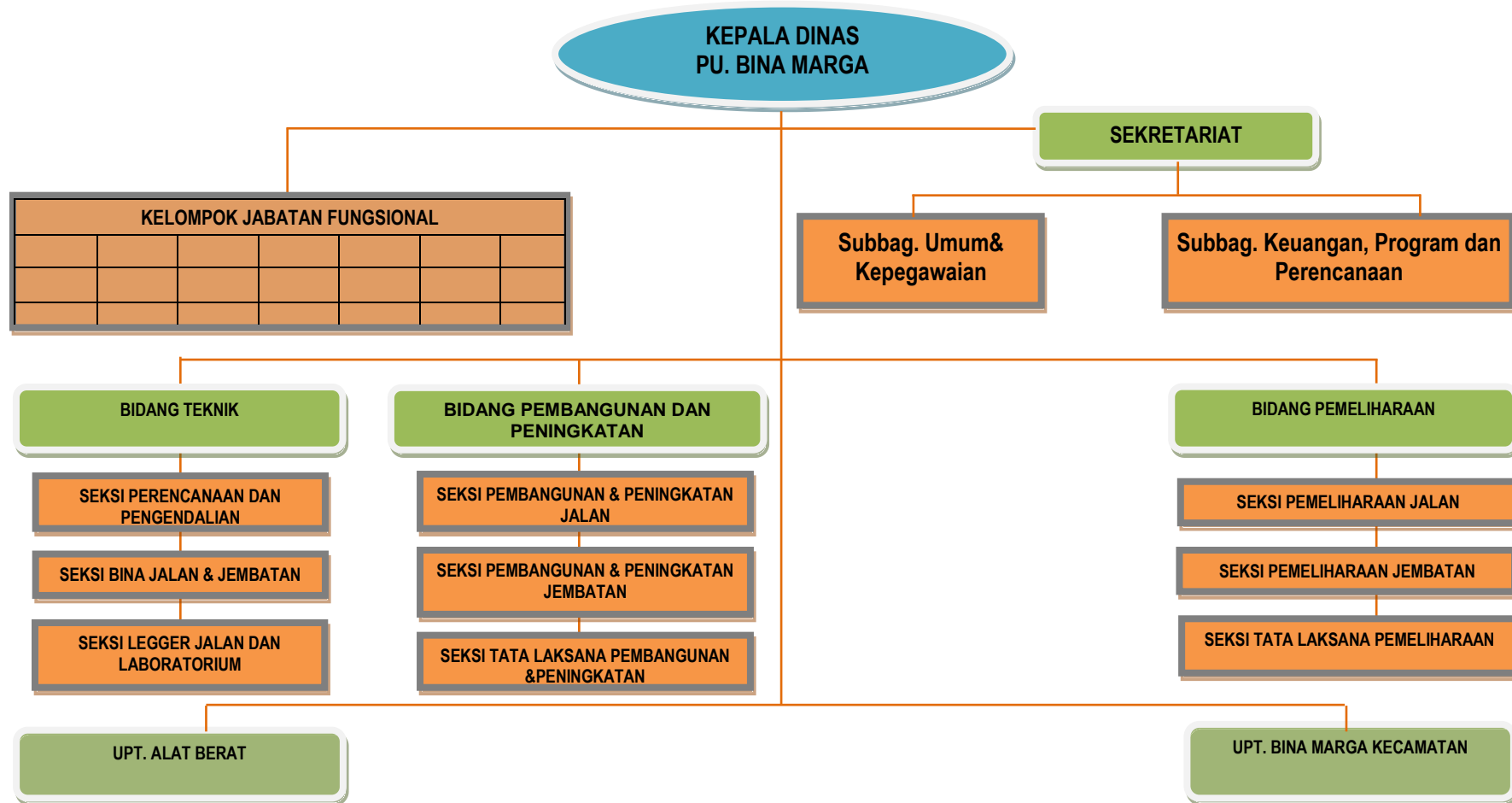
Dalam perkembangannya, Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara terus menerus telah berusaha sedapat mungkin untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam rangka terciptanya **“GOOD GOVERNANCE”** melalui pelaksanaan fungsi pengawasan.

Berdasarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahwa Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Kebinamargaan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep. Secara struktural, Dinas PU. Bina Marga terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Kepala Dinas | =1 orang |
| 2. Sekretariat | =1 orang |
| 3. Kepala Bidang | =3 orang |
| 4. Kasubbag | =2 orang |
| 5. Kasi | =9 orang |
| 6. Kepala UPT Alat Berat | =1 orang |
| 7. Kepala UPT Bina Marga Kec. | =25 orang |
| 8. Staf | =52 orang |

1.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi



Gambar :Struktur Organisasi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep
 (Perbup No. 49 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah)

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Peraturan Bupati Nomor : 49 Tahun 2016 menetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang Pekerjaan Umum Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan dalam melaksanakan tugas seperti yang dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pekerjaan umum bina marga;
- b. Perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum bina marga;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional yang mencakup perencanaan dan pemeliharaan laboratorium serta legger jalan;
- d. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;.
- e. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan alat berat, dan pembangunan bina marga kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi (tugas pembantuan) yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah di bidang pembangunan bina marga sesuai tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mengakomodir harapan/tujuan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PU. Bina Marga, maka kebijakan umum Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep diarahkan pada peningkatan dan pengembangan serta pemeliharaan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan serta fasilitas pendukung jalan lainnya melalui :

1. Kebijakan Bidang Teknik

- ❖ Peningkatan penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman serta di kawasan perbatasan, daerah terisolir, daerah bencana dan rawan bencana.

2. Kebijakan Bidang Pembangunan

- ❖ Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kondisi jalan, jembatan, serta fasilitas pendukung jalan lainnya.

3. Kebijakan Bidang Pemeliharaan

- ❖ Peningkatan kondisi jalan untuk pengembangan wilayah dan penghubung dengan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.

Kegiatan tersebut di atas merupakan fungsi utama disamping fungsi finansial, sebagai Dinas Penghasil dalam rangka peningkatan PAD sektorkebinamargaan yaitu Sewa alat-alat berat.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan stratejik merupakan rencana jangka panjang Dinas PU. Bina Marga yang dibuat secara bersama-sama antara Pimpinan dan seluruh Komponen Organisasi.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang merefleksi cita-cita yakni hendak menjadi apa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep di masa depan dan sekaligus menentukan arah perjalanan Instansi ini karena Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep merupakan Instansi pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kebinamargaan, Dinas PU. Bina Marga mendukung visiBupati Sumenep.

Guna mewujudkan eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep dalam lingkup yang terus menerus berkembang, perlu kiranya dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut disusun oleh suatu tahapan yang konsisten, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil secara maksimal.

Tahapan tersebut dimulai dengan perumusan visi yang jelas dan maupun menarik komitmen, menciptakan makna bagi kehidupan organisasi.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah :

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Mengacu pada Visi Bupati tersebut dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2010 – 2025 yang menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD 2016 – 2021 selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta *stakeholder* dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Dari enam misi tersebut , yang menjadi kewenangan dan tupoksi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep adalah terkait pada Misi kedua yaitu: **” Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan”**

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Bupati Sumenep yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka ditetapkan tujuan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan yang hendak dicapai, antara lain :

- 1) Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2016 – 2020
- 2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- 3) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi
- 4) Memiliki orientasi ke masa depan
- 5) Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep dan juga *stake holders*
- 6) Menjamin kesinambungan kepemimpinan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep.
- 7) Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan pekerjaan umum bina marga yaitu : “Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan wilayah daratan dan kepulauan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan.”

1.4 PERMASAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Terkait upaya dalam pelaksanaan pencapaian kinerja terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Bererapa permasalahan utama yang menjadi permasalahan adalah :

1. Jumlah dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;

2. Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;
3. Belum maksimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan terutama dana untuk bagian perencanaan dan pengawasan suatu kegiatan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di lapangan didukung pula dengan masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEJIK

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep adalah :

- ❖ Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan di wilayah daratan dan kepulauan.”

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas maka dilaksanakan kebijakan-kebijakan yaitu:

- Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin dan berkala untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan jalan untuk wilayah daratan dan wilayah kepulauan dalam rangka pengembangan wilayah dan penghubung dengan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.

Untuk mewujudkan Misi Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan pada Tahun 2017, maka secara bertahap berkomitmen Bupati Sumenep bersama Kepala OPD melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dimana merupakan tahun pertama yang telah ditetapkan guna mengetahui gambaran capaian indikator kinerja sasaran dalam 1 (satu) tahun yang diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan / jembatan.	Proporsi infrastruktur dalam kondisi baik		Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan di wilayah daratan dan kepulauan	Proporsipanjang jalan dalam kondisi baik	
	Daratan :			Wilayah Daratan :	70,82%
	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	70,82%		Wilayah Kepulauan :	52,37%
	Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik	86,70%			
	Kepulauan :			Proporsijumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	
	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	52,37%		Wilayah Daratan :	86,70%
	Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik	81,82%		Wilayah Kepulauan :	81,82%

Perencanaan kinerja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep tahun 2017 dengan mendasarkan pada :

- ❖ Visi dan misi Bupati Sumenep yang telah ditetapkan
- ❖ Tugas pokok dan fungsi
- ❖ Program kerja

Adapun kegiatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan sasaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana rencana kinerja adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan di wilayah Daratan dan Kepulauan.

SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah daratan dan kepulauan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan masyarakat	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang Jalan kabupaten yang dibangun di kabupaten Sumenep dan Jembatan kabupaten yang dibangun di kabupaten Sumenep	40%	32.024.904.095,-
	Pembangunan Jalan			
	Pembangunan Jembatan			
	Perencanaan Teknis pembangunan Jalan dan Jembatan			
	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan			
Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai akses masyarakat dari dan atau menuju pusat kota adari daerah pertanian, tempat wisata dan pusat kegiatan lainnya di wilayah daratan dan	2. Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak ringan dan sedang	25%	52.976.198.803,-

kepulauan				
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan			
	Rehabilitasi / Pemeliharaan jembatan			
	Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan			
	Pemeliharaan Berkala Jalan DAK			
	Perencanaan Teknik Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan			
Tersedianya dokumen tentang kondisi infrastruktur untuk mendukung kegiatan pembangunan jalan dan jembatan	3. Program Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah dokumen tentang data kondisi jalan yang akan ditangani	25%	75.365.000,-
	Survey Kelayakan Penanganan Jalan dan Jembatan			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Badan Hukum/Pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Atas dasar tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup Akuntabilitasnya masing-masing karena Akuntabilitas yang diminuti meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016–2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kabupaten Sumenep yang terdiri dari satu sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Jalan di wilayah Daratan dan Kepulauan dan Dua indikator kinerja (*out comes*) yaitu pertama Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Wilayah Daratan dan Kepulauan, Kedua Proporsi Panjang Jembatan dalam kondisi baik untuk wilayah Daratan dan Kepulauan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagaiberikut :

Perbandingan Target Tahun 2017 dan Realisasi Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2017	REALISASI TH. 2017	% CAPAIAN TH. 2017
1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan di wilayah daratan dan kepulauan	Proporsipanjang jaringan jalan dalam kondisi baik ~ Wilayah Daratan ~Wilayah Kepulauan	70,82 % 52,37 %	77,38% 53,23%	109,26% 101,64%
1.2		Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik ~ Wilayah Daratan ~ Wilayah Kepulauan	86,70 % 81,82 %	96,67% 90,91%	111,50% 111,11%

(Tabel 1.1)

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja , Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2016 Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TH. 2017	REALISASI KINERJA	
				Th. 2016	Th. 2017
1.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan di wilayah daratan dan kepulauan	Proporsipanjang jaringan jalan dalam kondisi baik ~ Wilayah Daratan ~Wilayah Kepulauan	70,82 % 52,37 %	60,74 % 38,31%	77,38% 53,23%
1.2		Proporsi Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik ~ Wilayah Daratan ~ Wilayah Kepulauan	86,70 % 81,82 %	80,99% 78,20%	96,67% 90,91%

(Tabel 1.2)

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET AKHIR TAHUN 2020	REALISASI AKUMULASI s/d. TAHUN 2017	% CAPAIAN
1	2		3	4	5
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan di wilayah daratan dan kepulauan	1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Wilayah Daratan	74,78	77,38	96,64
		Wilayah Kepulauan	56,15	53,23	105,49
	1.2 Proporsi Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Wilayah Daratan	90,87	96,67	94,00
		Wilayah Kepulauan	85,37	90,91	93,91

3.2 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk mengukur sejauhmana sebuah instansi mengalami peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan maka diperlukan kajian-kajian atau analisis sebagai berikut:

1. Indikator *Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan*

Untuk indikator pertama yaitu Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 70,82% sedangkan realisasinya adalah 77,38% dan Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan memiliki target 52,37% sedangkan realisasinya 53,23% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja yang baik karena realisasinya melebihi dari target yang telah ditentukan dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini Berhasil.

Untuk angka realisasi Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan sehingga memperoleh angka sebesar 77,38% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah daratan 870,93 km di bagi dengan jumlah keseluruhan jalan di wilayah daratan sepanjang 1.125.54 km.

Sedangkan angka realisasi Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan sehingga memperoleh angka sebesar 53,23% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kepulauan 221,96 km di bagi dengan jumlah keseluruhan jalan di wilayah kepulauan sepanjang 416,82 km.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 maka realisasi 2017 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan terealisasi 60,74% dan untuk Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan terealisasi 38,31%.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik wilayah daratan dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 74,78% dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 96,64%. Untuk wilayah kepulauan dengan target pada akhir masa RPJMD 56,15% dengan capaian kinerja 105,49%.

Indikator ini dapat berhasil dikarenakan adanya dukungan dari Kegiatan Pemeliharaan Jalan yang didanai oleh DAK untuk wilayah daratan dan kepulauan walaupun beberapa kegiatan dilaksanakan pada jalan-jalan desa yang tidak tercantum pada ruas jalan kabupaten sehingga tidak dapat dicatat sebagai penambahan jalan dengan kondisi baik.

2. Indikator ***Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan***

Untuk indikator kedua yaitu Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan memiliki target 86,70% sedangkan relisasinya

96,67% dan untuk Wilayah Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Kepulauan targetnya adalah 81,82% dan realisasinya 90,91% hal ini juga menunjukkan sebuah hasil kinerja yang baik karena realisasinya melebihi dari target yang telah ditentukan dan indikator ini termasuk Berhasil.

Untuk angka realisasi Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan sehingga memperoleh angka sebesar 96,67% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah jembatan dalam kondisi baik di wilayah daratan 203 buah dibagi dengan jumlah keseluruhan jumlah jembatan di wilayah daratan sebanyak 210 buah.

Sedangkan untuk angka realisasi Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Kepulauan sehingga memperoleh angka sebesar 90,91% yaitu hal ini merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah jembatan dalam kondisi baik di wilayah kepulauan 30 buah dibagi dengan jumlah keseluruhan jumlah jembatan di wilayah kepulauan sebanyak 33 buah.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 maka realisasi 2017 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik Wilayah Daratan terealisasi 80,99% dan untuk Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi Baik wilayah kepulauan terealisasi 78,20%.

Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi baik wilayah daratan dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 90,87% Dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 94,00%. Untuk wilayah kepulauan dengan target pada akhir masa RPJMD 85,37% dengan capaian kinerja 93,91%.

Indikator ini sangat berhasil dikarenakan pada dasarnya jembatan-jembatan yang ada baik di daratan maupun kepulauan sudah kondisi baik adapun pembangunan atau pemeliharaan apabila mengalami kerusakan berat sehingga target yang sudah ditetapkan dapat direalisasikan .

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan antara lain :

1. Jumlah dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
2. Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;
1. Belum maksimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan terutama dana untuk bagian perencanaan dan pengawasan suatu kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di lapangan didukung pula dengan masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.

Solusi untuk penanggulangan kendala-kendala terkait upaya mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui perubahan jumlah pegawai & diklat, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggung jawab);
2. Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir;
3. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
4. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Selain kendala-kendala diatas pada saat pelaksanaan pekerjaandi lapangan terdapat beberapa kendala lainnya, sebagaimana yang terjadi pada kegiatan PeningkatanJln. Trunojoyo dimana pelaksanaan pekerjaannya sedikit agak terlambat karena proses ijin dan perencanaan teknis yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Balai BesarPelaksana Jalan Nasional

VIII di Surabaya sebagai penanggung jawab ruas jalan Nasional di Provinsi Jawa Timur. Setelah proses tersebut selesai dilaksanakan maka paket pekerjaannya dapat ditenderkan dan pelaksanaan pekerjaannya yang kemudian dapat diselesaikan pada akhir Tahun 2017.

Kemudian pada kegiatan Pembangunan Jalan / Pemeliharaan Berkala Jalan baik yang terdapat di wilayah Daratan maupun di Wilayah Kepulauan, untuk wilayah kepulauan terkaithambatan yaitu penyediaan alat ampar yang harus disediakan oleh pelaksana di masing-masing pulau yaitu di Pulau Sepudi tepatnya di Kec. Gayam dan Kec. Nonggunong, Pulau Raas, dan di Pulau Kangean tepatnya di Kec. Arjasa dan Kec. Kangayan. Solusi terkait dengan kendala alat ampar di pulau - pulau tersebut adalah para pelaksana berkoordinasi dan bersepakat untuk mengatur jadwal kerja di masing-masing pulau dan menjamin tersedianya aspal dingin (CPHMA) sesuai jadwal kerja sehingga dengan demikian semua paket pekerjaan dengan konstruksi CPHMA (Aspal Dingin) di Wilayah Kepulauan dapat terselesaikan pada waktunya.

3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam mengukur analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya dilakukan evaluasi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Cost Per-outcome :

a. Alokasi Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kebutuhan pemenuhan Infrastruktur Jalan.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik :		
		- Wilayah Daratan	54.893.834.883,70	63,03
		- Wilayah Kepulauan	29.750.386.014,30	34,16

	Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi baik :		
	- Wilayah Daratan	1.959.233.600	2,25
	- Wilayah Kepulauan	489.808.400	0,56

(tabel 2.1)

b. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realiasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah daratan dan kepulauan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan masyarakat	Jumlah panjang jalandalam kondisi baik di Kabupaten Sumenep	1060,56 km	1056,53 km	99,62%	72.681.058.440.412,00	63.519.944.412,00	87,40%
1.1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							
2. Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai akses masyarakat dari atau menuju pusat kota dari daerah pertanian, tempat wisata dan pusat kegiatan lainnya di wilayah daratan dan wilayah kepulauan.	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik di kabupaten sumenep	244 buah	243 buah	99,68%	3.027.485.000,00	2.700.281.950,00	89,19%
2.1. Program Rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan							
3. Tersedianya dokumen tentang kondisi infrastruktur untuk mendukung kegiatan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen tentang data kondisi jalan yang akan ditangani	1 dokumen	1 dokumen	100%	75.365.000	56.034.700	74,35%
3.1. Program Inspeksi Kondisi Jalan							

(tabel 2.2)

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah daratan dan kepulauan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan masyarakat	Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik yang dibangun di Kabupaten Sumenep	99,62%	90,27%	9,35%
Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai akses masyarakat dari atau menuju pusat kota dari daerah pertanian, tempat wisata dan pusat kegiatan lainnya di wilayah daratan dan wilayah kepulauan.	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik yang dibangun di kabupaten Sumenep	99,68%	67,17%	32,51%
Tersedianya dokumen tentang kondisi infrastruktur untuk mendukung kegiatan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah dokumen tentang data kondisi jalan yang akan ditangani	95,12%	74,68%	20,44%

(tabel 2.3)

Pada tahun 2017 terkait penggunaan sumber daya, untuk indikator Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Untuk wilayah Daratan dengan jumlah anggaran Rp.54.893.834.883,70 dan realisasi anggarannya sebesar 63,03% sedangkan untuk wilayah kepulauan dengan jumlah anggaran Rp. 29.750.386.014,30 dan realisasinya sebesar 34,16%.

Untuk indikator Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Untuk wilayah Daratan dengan jumlah anggaran Rp.1.959.233.600 dan realisasi anggarannya sebesar 2,25% sedangkan wilayah kepulauan dengan jumlah anggaran Rp. 489.808.400 dan realisasinya sebesar 0,56%.

Sedangkan untuk Pencapaian Kinerja dan Anggaran bahwa untuk indikator Proporsi Jumlah Jalan dalam kondisi baik untuk pencapaian kinerjanya memiliki target 1060,56 km sedangkan realisasinya 1056,53 km sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 99,62%. Sedangkan untuk pencapaian anggarannya dengan pagu anggaran Rp.72.681.058.440.412,00 dengan realisasi Rp.63.519.944.412,00 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 87,40%.

Bahwa untuk indikator Proporsi Jumlah Jembatan dalam kondisi baik untuk pencapaian kinerjanya memiliki target 244 buah sedangkan realisasinya 243 buah

sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 99,68%. Sedangkan untuk pencapaian anggarannya dengan pagu anggaran Rp.3.027.485.000,00 dengan realisasi Rp.2.700.281.950,00 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 89,19%.

Sedangkan untuk jumlah dokumen tentang data kondisi jalan yang akan ditangani untuk pencapaian kinerjanya memiliki target 1 dokumen sedangkan realisasinya 1 dokumen sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 100%. Sedangkan untuk pencapaian anggarannya dengan pagu anggaran Rp.75.365.000,00 dengan realisasi Rp.56.034.700,00 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 74,35%.

Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk indikator Proporsi jumlah Jalan dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 99,62% dengan anggaran terserap sebesar 90,27% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai 9,35%.

Untuk indikator Proporsi jumlah Jembatan dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 99,68% dengan anggaran terserap sebesar 67,17% sehingga dapat disimpulkan tingkat efisiensinya mencapai 32,51%.

Kemudian untuk jumlah Dokumen tentang data kondisi jalan yang akan ditangani dengan capaian kinerja 95,12% dengan anggaran terserap sebesar 74,68% sehingga dapat disimpulkan tingkat efisiensinya mencapai 20,44%.

3.4 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sumenep didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan Indikator ini dapat berhasil dikarenakan didukung oleh
 - **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan** dengan didukung kegiatan pertama yaitu Pembangunan Jalan dengan

output jumlah jalan yang ditingkatkan, dimana kegiatan yang sifatnya strategis dilaksanakan di 5 (lima) lokasi di wilayah **daratan** yaitu 2 lokasi terdapat di kecamatan Lenteng, 1 lokasi di kecamatan Guluk-guluk, 1 lokasi di kecamatan Ganding dan 1 lokasi di kecamatan Batu Putih. Sedangkan untuk wilayah **kepulauan** juga terdapat di 5 lokasi yaitu 1 lokasi di kecamatan Talango, kecamatan Gayam 2 lokasi, 1 lokasi di kecamatan Nonggunong dan 1 lokasi di kecamatan Kangayan.

Kedua adalah kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan output jumlah jalan dan jembatan strategis yang direncanakan untuk **wilayah daratan** terdapat 2 paket, lokasi kegiatannya tersebar diberbagai lokasi. Sedangkan untuk **kepulauan** satu paket kegiatan.

- **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** dengan kegiatan pertama adalah Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dengan output jumlah jalan yang terpelihara sebagaimana terdapat di 7 (tujuh) paket strategis di wilayah **daratan** dengan lokasi kegiatannya juga tersebar. Sedangkan untuk **kepulauan** terdapat 1 (satu) paket.

Kedua kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dengan output jumlah jalan yang terpelihara dan untuk kegiatan ini lokasi kegiatannya juga tersebar diberbagai lokasi baik di wilayah daratan dan juga kepulauan (27 kecamatan di kabupaten Sumenep daratan dan kepulauan).

Ketiga untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK dengan output jumlah jalan yang terpelihara, dan lokasinya terdapat di 5 (lima) lokasi yang terdapat di wilayah **daratan** yaitu 2 lokasi terdapat di kecamatan Lenteng, kecamatan Guluk-guluk, kecamatan

Ganding dan kecamatan Batu Putih. Sedangkan untuk **kepulauan** juga tersebar di 5 (lima) lokasi yaitu di kecamatan Talango, kecamatan Gayam 2 lokasi, kecamatan Nonggunong dan kecamatan Kangayan.

- **Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan** dengan kegiatan Survey Kelayakan Penanganan Jalan dan Jembatan dengan output survey kelayakan rencana penanganan jalan/jembatan. Untuk kegiatan ini lokasi kegiatannya juga tersebar diberbagai lokasi baik di wilayah daratan dan juga kepulauan (27 kecamatan di kabupaten sumenep daratan dan kepulauan).

2. Indikator Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan Indikator ini sangat berhasil dikarenakan didukung oleh

- **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan** yaitu kegiatan Pembangunan Jembatan dengan output jumlah jembatan yang dibangun /diperbaiki dan untuk wilayah **daratan** kegiatan ini dilaksanakan di 7 lokasi yaitu di kecamatan Kota, kecamatan Manding, kecamatan Pragaan 2 lokasi, kecamatan Rubaru juga 2 lokasi dan terakhir di kecamatan Guluk-guluk. Sedangkan di wilayah **kepulauan** terdapat 3 lokasi kegiatan, yaitu 2 lokasi di kecamatan Arjasa dan 1 lokasi di kecamatan Sapeken.
- **Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** yaitu kegiatan Pemeliharaan Jembatan dengan output jumlah jembatan yang terpelihara dan untuk kegiatan ini lokasi kegiatannya juga tersebar diberbagai lokasi baik di wilayah daratan dan juga kepulauan (27 kecamatan di kabupaten sumenep daratan dan kepulauan).

3.5 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung realisasi kinerja dari 2 indikator tersebut, Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Menganggarkan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp.32.024.904.095,00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.909.108.520,00 atau 90,27 %, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 52.976.198.803.00 terealisasi sebesar Rp.46.179.915.510.00 atau 87,17 % serta Program Inspeksi Jaringan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 75.365.000.00 terealisasi sebesar Rp.56.034.700.00 atau 74,35 % untuk mendukung Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan Indikator Jumlah Jembatan dalam kondisi Baik.

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	Persentase (%)
2	3	4	5
BELANJA LANGSUNG	87.093.262.898,00	76.709.416.864,00	88,11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.888.500,00	547.244.008,00	69,63
Penyediaan jasa surat menyurat	2.930.000,00	1.885.000,00	64,33
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	165.000.000,00	97.818.271,00	59,28
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.500.000,00	15.856.400,00	67,47
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000,00	3.438.500,00	85,96
Penyediaan alat tulis kantor	42.970.000,00	31.219.050,00	72,65
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.345.000,00	3.478.000,00	33,62
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18.750.000,00	9.323.000,00	49,72
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	75.740.000,00	49.185.000,00	64,94
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000,00	35.225.787,00	39,14
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	13.000.000,00	1.090.000,00	8,38
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional UPTD	227.053.500,00	212.285.000,00	93,5
	87.600.000,00	61.440.000,00	70,14

Pameran Pembangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	100
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	426.406.000,00	278.670.902,00	65,35
Pengadaan Komputer	95.728.000,00	85.893.000,00	89,73
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	185.578.000,00	101.142.369,00	54,5
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118.600.000,00	65.205.283,00	54,98
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	26.500.000,00	26.430.250,00	99,74
Program peningkatan disiplin aparatur	62.503.000,00	61.218.000,00	97,94
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	62.503.000,00	61.218.000,00	97,94
Pengadaan Pakaian Olah Raga	0,00	-	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	35.000.000,00	15.045.000,00	42,98
Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000,00	15.045.000,00	42,98
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55.842.000,00	30.068.150,00	53,85
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.210.000,00	6.152.000,00	60,25
Penyusunan laporan keuangan semesteran	10.341.000,00	4.531.250,00	43,82
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000,00	4.111.000,00	41,11
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.066.000,00	3.685.000,00	60,75
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD	19.225.000,00	11.588.900,00	60,28
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	32.024.904.095,00	28.909.108.520,00	90,27
Pembangunan jalan	2.592.209.060,00	2.521.536.610,00	97,27
Pembangunan jalan	2.806.250,00	2.806.250,00	100
Pembangunan jalan	21.799.085.035,00	19.364.448.800,00	88,83
Pembangunan jembatan	19.892.300,00	19.881.700,00	99,95
Pembangunan jembatan	2.449.042.000,00	2.161.472.000,00	88,26
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	3.846.000,00	3.846.000,00	100
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	8.028.450,00	7.398.450,00	92,15
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan	149.995.000,00	126.105.000,00	84,07
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan	5.000.000.000,00	4.701.613.710,00	94,03
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	52.976.198.803,00	46.179.915.510,00	87,17
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	4.237.019.000,00	4.022.513.450,00	94,94
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	578.443.000,00	538.809.950,00	98,15
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan	261.346.700,00	258.920.200,00	99,07

Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan	8.383.500,00	8.383.500,00	100
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan	15.541.054.405,00	14.839.621.200,00	95,49
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK	1.070.593.848,00	1.070.593.848,00	100
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK	11.187.900,00	6.184.800,00	55,28
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DAK	30.603.900.000,00	24.887.837.462,00	81,32
Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11.137.650,00	-	0
Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	350.005.000,00	279.418.500,00	79,83
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK Tambahan)	3.127.800,00	3.127.800,00	100
Dana Operasional Bantuan Keuangan Percepatan/Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan	100.000.000,00	65.508.800,00	65,51
Pengadaan Marka Jalan	200.000.000,00	198.996.000,00	99,5
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	75.365.000,00	56.034.700,00	74,35
Survey Kelayakan Penanganan Jalan dan Jembatan	75.365.000,00	56.034.700,00	74,35
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	301.155.500,00	292.752.074,00	97,21
Operasional dan Pemeliharaan Alat - alat Berat	301.155.500,00	292.752.074,00	97,21
Program Hari-Hari besar	350.000.000,00	339.360.000,00	96,96
Hari Kebaktian Pekerjaan Umum	350.000.000,00	339.360.000,00	96,96

**BAB IV
PENUTUP****4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 (tiga) bidang dalam kegiatan tahun 2017 mempunyai 1 (satu) sasaran. Dari sasaran tersebut Indikator Kinerja yang dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja rata-rata adalah 105,45%, yaitu Indikator *Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik, di Wilayah Daratan* tercapai 109,26% dan *Kepulauan* tercapai 101,64%. Sedangkan untuk indikator kedua yaitu *Proporsi Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik* mempunyai Capaian indikator kinerja dengan rata-rata 111,31% dimana untuk *Wilayah Daratan* tercapai 111,50% dan *Wilayah Kepulauan* tercapai 111,11%.

Selanjutnya Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep mengalokasikan dalam APBD tahun 2017 berupa Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp.6.578.863.972.00 dan Rp.87.093.262.898.00. Adapun realisasinya sampai dengan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.685.079.855.00 atau sebesar 86,41% dan Rp. 76.709.416.864.00 atau 88,07%.

Kemudian untuk Peningkatan Jalan yang terdapat di Jln. Trunojoyo pelaksanaan pekerjaannya mengalami sedikit keterlambatan karena proses ijin dan perencanaan teknis yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VIII di Surabaya. Namun Setelah proses tersebut selesai maka paket pekerjaannya dapat ditenderkan dan mendapat pelaksana yang kemudian menyelesaikan pekerjaannya pada akhir Tahun 2017.

Sementara itu untuk mengatasi masalah yang muncul diwilayah kepulauan para pelaksana bersepakat untuk mengatur jadwal kerja di masing-masing pulau dengancara menyediakan aspal dingin dan alat ampar yang memadai sehingga dengan demikian semua paket pekerjaan dengan konstruksi CPHMA (Aspal Dingin) di Wilayah Kepulauan dapat terselesaikan pada waktunya.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Jumlah dan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas;
2. Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih kurang sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;
3. Belum maksimalnya dukungan dana atau anggaran yang diberikan terutama dana untuk bagian perencanaan dan pengawasan suatu kegiatan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di lapangan didukung pula dengan masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, misalnya melalui perubahan jumlah pegawai & Diklat, Studi Banding, Tugas Belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggung jawab);
2. Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir;
3. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
4. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain dengan harapan pelaksanaan dengan instansi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep didalam mencapai visi dan misi Bupati Sumenep yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi Tahun Anggaran 2017. Harapan kami, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.